

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara saat ini sedang menghadapi *trend* baru atau bisa dikatakan sebagai *new era*, yaitu terjadinya percepatan pembangunan infrastruktur. Dilihat dari *Infrastructure Competitiveness index*, dimana tingkat kompetisi pembangunan infrastruktur meningkat di negara-negara di ASEAN (Schwab, 2019), begitu juga laporan yang dirilis oleh sekretariat ASEAN di Jakarta yang menyatakan bahwa terjadi akselerasi pembangunan infrastruktur (ASEAN, 2020). Tentunya ada faktor tertentu kenapa negara-negara berkembang berada pada pemahaman yang bersifat kolektif yaitu terhadap minimnya teknologi, biaya pembangunan, limitasi dari sumber daya manusia. Menurut tinjauan peneliti, tren ini dipicu oleh adanya inisiasi kerja sama dari negara yang memiliki *state power* yang memberikan peluang dan bantuan bagi negara berkembang dalam pembangunan infrastruktur yang kompleks. Diantaranya adalah Jepang melalui ide *Quality Infrastructure (QI)* yang membantu negara berkembang dalam pembangunan infrastruktur.

Sebagai fokus pembahasan pada tulisan ini, peneliti mengacu pada bantuan luar negeri Jepang kepada salah satu negara ASEAN yaitu Indonesia. Hubungan bilateral Jepang dan Indonesia telah berlangsung cukup lama, khususnya dalam bidang ekonomi, praktik demokrasi, mitigasi bencana, infrastruktur publik, pencegahan banjir, kekeringan dan polusi air (MOFA, 2014). Bantuan Jepang banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti jalan, pembangkit tenaga listrik dan karena itu kemajuan ekonomi Indonesia tidak luput dari perkembangan infrastruktur yang dibantu Jepang melalui bantuan luar negeri *Official Development Assistance (ODA)* (Kartasasmita, 2020). Bantuan konkret lainnya seperti bantuan untuk rekonstruksi 19 jembatan yang rusak akibat bencana banjir di Sulawesi (JICA, 2019b). Salah satu dari bentuk bantuan luar negeri adalah bantuan berupa pinjaman dana yang diberikan kepada negara penerima donor atau *recipient*. Melalui program ODA, Jepang telah mendonasikan sebesar US\$ 14.2 miliar pada tahun 2018 miliar, total jumlah donasi tersebut sekitar 0,28 persen dari pendapatan nasional Jepang (Donortracker, 2018).

Bantuan Jepang menurut data dari laman Donortracker (2020), pada tahun 2020 Jepang pernah menduduki posisi sebagai pendonor terbesar ke 4 di dunia.

Sejatinya jauh sebelum bantuan itu mengalir, sudah terjadi interaksi antara negara maju (*developed country*) dan negara berkembang (*developing country*) baik itu dalam upaya menjaga, mempererat ataupun memperbaiki hubungan bilateral ataupun multilateral yang telah terjalin dalam jangka waktu yang lama dalam nuansa hubungan internasional yang berlangsung dinamis. Bantuan luar negeri sering mengalir dengan adanya kesepakatan kedua negara yang menyalurkan bantuan dan menerima bantuan baik itu untuk memperbaiki isu ekonomi, kemanusiaan, keamanan dan pertahanan.

Bantuan luar negeri Jepang cukup merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dan kehidupan sosial di Indonesia. Sehingga mampu membangun sebagian infrastruktur ekonomi, sosial dan infrastruktur lingkungan secara mandiri. Dari bantuan tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara penerima bantuan ODA Jepang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1960-2015 (JICA, 2019a). Salah satu bentuk bantuan Jepang kepada Indonesia adalah pada tahun 2019 yang memberikan pinjaman dana lunak untuk pembangunan salah satu proyek nasional yaitu pembangunan IPAL (*Instalasi Pengelolaan Air Limbah*) di kawasan Jakarta. Pinjaman dana lunak merupakan pinjaman dengan syarat pelunasan ringan. Jepang memberikan bantuan berupa pinjaman dana lunak dimana Indonesia membutuhkan suntikan dana untuk membiayai sebagian biaya konstruksi infrastruktur terkait. Pinjaman dana tersebut merupakan agenda ODA Jepang yang disalurkan melalui organisasi resmi Jepang yaitu JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Tujuan dari pembangunan infrastruktur IPAL tidak hanya ditujukan untuk mengatasi isu limbah, namun juga untuk mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Diharap dari pembangunan infrastruktur juga mampu untuk mengatasi banjir dengan cara menambah pipa saluran limbah dan tangkapan air.

Bantuan Jepang terhadap negara - negara berkembang seperti Indonesia memiliki *social value* dimana adanya upaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dan keselamatan khalayak ramai. Tentu ada norma-norma yang disepakati untuk menjadi acuan bagi perumusan kebijakan Jepang sebagai anggota OECD-DAC juga memiliki agenda yang fokus dalam isu lingkungan global dan regional. Sebagai negara ekonomi maju di Asia, ODA Jepang juga dituntut untuk berkontribusi terhadap isu lingkungan di wilayah Asia tenggara. Dimana organisasi meregulasi dan meninjau tujuan dan keberhasilan ODA setiap negara anggota. Tidak hanya itu, agenda global lainnya seperti

tujuan SDGs (*sustainable development goals*) (Casier, 2015). Praktek SDGs sendiri merupakan produk *agenda-setting* dari anggota UN (*United Nation*)(UN, 2015). Secara *intangibile* UN menanam nilai penting dalam SDGs bagi setiap aktor negara untuk berperan aktif pada pembangunan ketahanan infrastruktur. Dari praktik sosialnya bisa dilihat bahwa Jepang membantu negara-negara berkembang dengan merealisasikan salah satu poin SDGs 6 dan 9 yaitu *building resilient infrastructure* dan *safe and affordable drinking water* sebagaimana tercantum dalam *Sutanainable Develovment Goals (SDG's)* (sdg-tracker.org). Tujuan bantuan tersebut ditegaskan lagi pada laporan *ex-ante evaluation* pinjaman dana ODA (*Official development assistance*) (JICA, 2019) sebagai berikut:

“This Project conforms to the development issues and policies of the Republic of Indonesia as well as the assistance policy of Japan and JICA’s analysis documents. The introduction of a sewerage system, which consists of sewer network and wastewater treatment plant, will improve water environment and sanitation access in the Special Capital Region of Jakarta. Moreover, this project is to contribute to the achievement of Goal 6 of the SDGs (Ensure availability and sustainable management for water and sanitation for all). Therefore, it is highly necessary for JICA to provide support for the implementation of this Project.”

Dari pernyataan diatas, Jepang mendukung agenda global dan memasukan agenda tersebut dalam program bantuan luar negerinya untuk membantu negara berkembang. Sebagai contoh dalam isu ini adalah isu lingkungan di Jakarta. Seperti yang diketahui, Jakarta selalu menghadapi problematika lingkungan yang bersifat kontinuitas secara estafet. Seperti banjir, kontaminasi saluran air, penurunan tanah, pencemaran limbah pada badan air dan kesadaran publik yang kurang terhadap pembuangan limbah. Di Ibu Kota sendiri tercatat bahwa air limbah terdiri dari tiga bagian yaitu air limbah industri yang berasal dari pabrik, limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan terakhir adalah air limbah perkantoran (Yudo dan Said, 2001). Menurut Said (2006), Pencemaran dari ketiga sumber air limbah tersebut dapat diukur dari parameter pencemaran *Biochemicall Oxygen Demand* (BOD) dengan yang menunjukkan zat kimia melebihi batas baku mutu air yang seharusnya. Standar BOD baku mutu air yang akan dialirkan ke sungai dikutip dari laman PUPR (2017) terkonsentrasi sekitar 50 ppm. Apabila melebihi konsentrasi, maka akan menyebabkan pencemaran air.

Bantuan Jepang kepada Indonesia merupakan bantuan yang fokus terhadap lingkungan untuk mengatasi isu limbah di Jakarta. Menurut Dewi (2020), proyek ODA jepang di Indonesia belum sepenuhnya berdampak pada isu-isu lingkungan tingkat global dan

kawasan. Begitu juga pada isu lingkungan pada tingkat lokal di negara resipien. Terlebih jumlah perusahaan industri Jepang yang beroperasi di Jakarta juga terbilang banyak. Menurut laman Perusahaanjepang (2016), Perusahaan industri kimia dan medis berjumlah 88, *engineering* berjumlah 68 perusahaan, perusahaan industri plastik berjumlah 112, dan banyak lagi perusahaan industri Jepang di Jakarta. Anomali ini dapat dipahami bahwa penyaluran bantuan luar negeri tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan di negara berkembang karena hakikat dari negara berkembang penerima ODA itu sendiri tidak menempatkan isu lingkungan menjadi prioritas utama, melainkan mengalokasikan dana bantuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara pada sektor infrastruktur yang menghasilkan barang dan jasa. Disisi lain kebijakan ODA Jepang tidak hanya semata ditentukan oleh kepentingan nasional berdasarkan keadaan domestik, melainkan kebijakan ODA tersebut perlu disesuaikan dengan agenda global, baik itu dari SDGs maupun dari organisasi internasional seperti OECD-DAC yang meregulasi negara – negara anggota untuk berkontribusi dalam mengatasi isu-isu lingkungan maupun global dan lokal.

Dengan munculnya praktik bantuan tersebut, belum ada peneliti yang mengkaji fenomena terkait bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia terkait IPAL di Jakarta. Seiring meningkatnya bantuan luar negeri yang mengalir di negara-negara berkembang yang sedang menghadapi proses perkembangan kegiatan ekonomi, tidak sedikit dampak lingkungan yang terancam. Menurut hemat peneliti bahwa isu lingkungan dan bencana alam merupakan ancaman yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia atau *human security*. Oleh karena itu, bantuan terkait dengan keselamatan dan keamanan manusia memiliki nilai sosial dan moral yang kuat untuk melandasi bantuan tersebut. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji faktor – faktor sosial serta norma yang melandasi tindakan bantuan ODA Jepang kepada Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan yang ada di Jakarta. Peneliti memilih konstruktivis sebagai alat analisis untuk mengkaji ODA Jepang karena memiliki pisau analisis yang unik untuk mengkaji ODA Jepang tanpa menyentuh aspek materi, melainkan aspek sosial yang melandasi suatu tindakan aktor internasional yang sulit terkuak dipermukaan. Oleh karena itu, peneliti akan menunjukkan faktor apa saja yang melandasi ODA Jepang untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang dipaparkan pada pendahuluan, konsentrasi dari tulisan ini yaitu untuk mengkaji apa saja faktor yang melandasi ODA Jepang dalam membantu isu lingkungan yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah:

- 1 Menganalisa bantuan ODA Jepang kepada Indonesia untuk membangun pengelolaan air limbah di Kota Jakarta.
- 2 Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir semester dan juga sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Menyajikan penemuan terbaru terkait dana lunak Jepang yang dipinjamkan kepada Indonesia dalam fokus penanggulangan air limbah di Jakarta. Melalui kajian teoritis ini, penulisan dalam tesis menyuburkan dan memicu pemikiran kritis pembaca untuk memproyeksikan kegiatan bantuan luar negeri yang sedang dibangun oleh negara-negara maju melalui kegiatan kerja sama bilateral, agar bisa menajamkan analisis pembaca dalam melihat kepentingan negara pendonor.
2. Memberikan eksposur baru terhadap fenomena kerja sama bilateral berupa penyaluran bantuan luar negeri agar bisa dijadikan sebagai instrument untuk mengkaji kerja sama lainnya baik itu di Indonesia ataupun di negara lain.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam upaya mendukung jawaban untuk rumusan masalah, peneliti perlu meninjau beberapa kajian yang terkait dengan fokus penelitian. Kajian yang terkait menunjukkan jejak peneliti terdahulu yang konsen terhadap bantuan luar negeri Jepang serta pembentukan identitas dan norma internasional yang terkait dalam kajian tersebut. Begitu juga laporan resmi tidak luput dari kajian peneliti karena dinamika bantuan luar negeri relatif fleksibel, berbagai fenomena dapat terjadi sehingga bisa di narasikan dalam bentuk kajian Pustaka untuk mendukung dan menemukan novelti dari kajian peneliti. Berikut beberapa kajian yang telah di *review* oleh penulis:

Tabel 1. 1 Studi Pustaka

No	Penulis	Judul	Isi tulisan
1.	(Tular, Wayan, & Widyanugraha, 2016)	<i>Kepentingan Jepang Melalui JICA Terhadap Pemberian Bantuan Proyek DSDP di Indonesia</i>	Dalam kajian ini penulis menggunakan konsep bantuan luar negeri, kepentingan nasional, dan motif bantuan internasional. Pemerintah Jepang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Dengan jumlah pinjaman Pemerintah Indonesia sebesar 20 milyar yen melalui JICA untuk proyek pembangunan pembangunan i, Penulis menemukan bahwa <i>pertama</i> , tujuan bantuan ODA Jepang sebagai upaya pencapaian tujuan pemberi bantuan ODA. <i>Kedua</i> , bertujuan untuk mutu kesehatan wisman Jepang di Bali. <i>Ketiga</i> , mengirimkan pelatihan tenaga ahli. <i>Keempat</i> , yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
2.	(Kashiwabara, 2016)	<i>Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang</i>	Pada kajian ini peneliti bertujuan untuk menggali lebih jauh dari pertanyaan mengapa masyarakat bersikap kritis atas ODA Jepang dan apa dampak dari sikap kritis tersebut?. Dengan jumlah pinjaman Pemerintah Indonesia sebesar 20 milyar yen melalui JICA untuk proyek pembangunan PLTA di Koto Panjang, Penulis menemukan bahwa bantaun ODA Jepang tidak pro terhadap masyarakat serta merugikan masyarakat sekitar, namun pada level Pemerintah bantuan tersebut berhasil membangun PLTA karena sesuai dengan kepentingan negara
3.	Purnendra Jain, 2019	<i>Japan's Foreign Aid and 'Quality' Infrastructure Projects: The Case of the Bullet Train in India</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bantuan ODA Jepang dengan memberikan pinjaman dana lunak Yen melalui narasi "quality growth", "quality

			<p><i>infrastruktur investment</i>”, dan “<i>partnership</i>. Faktanya dalam temuan pada artikel ini, dimana Jepang pernah memberikan respon negatif terhadap uji coba nuklir India, berakhir pada kerja sama bilateral dengan memberikan pinjaman dana lunak guna pembangunan proyek kereta cepat di India. Ini menunjukkan bahwa interaksi bilateral masing-masing negara memberikan respon yang baik. Namun bantuan tersebut tidak semata-mata mengedepankan kemajuan ekonomi, akan tetapi bantuan luar negeri Jepang dijadikan sebagai strategi, bertujuan untuk menemukan <i>entry point</i> untuk mendemonstrasikan kualitas infrastruktur tepatnya dimulai dari India dan negara berkembang lainnya. Begitu juga kebijakan <i>quality infrastructure</i> merupakan respon terhadap Cina sebagai <i>competitor regional</i>.</p>
4.	Khoiriati, Siti Daulah, 2021	<i>The Transformation of Japan's Foreign Aid Policy to Indonesia: Explaining the Strategic Motives of ODA</i>	<p>Penelitian mengidentifikasi perubahan kebijakan bantuan luar negeri (ODA) Jepang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan <i>library research</i> dan <i>desk research</i> untuk melacak sejarah <i>foreing aid</i> Jepang ke Indonesia. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Jepang terjadi dipengaruhi oleh relasi antar negara dan perubahan nuansa politik domestik dan juga negara penerima bantuan. Salah satunya adalah longgarnya hubungan Jepang dan Indonesia dilihat dari pertimbangan Pemerintah Indonesia yang memutuskan Cina sebagai negara yang memegang proyek MRT.</p>

			Perubahan tersebut mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Jepang terhadap pendonor.
5.	Lewis Workman, 2018	<i>International Norms and Japanese Foreign Aid</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan bantuan luar negeri Jepang. Penulis menguji variabel dependen (komitmen bantuan Jepang) dan variable independent (<i>commercial, normative, security factors</i>) yang mempengaruhi komitmen ODA Jepang. Analisis dilakukan dengan menggunakan quantitatif research. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa bantuan berlandaskan kemanusiaan dan nilai demokrasi hanya sedikit mempengaruhi bantuan luar negeri Jepang. Akan tetapi bantuan tersebut lebih didominasi oleh prioritas keamanan Jepang.
6.	Ogawa, 2019	<i>Normality of International Norms: Power, Interests, and Knowledge in Japan's ODA Politics</i>	Jepang dalam tulisan ini berupaya untuk menanamkan identitas sebagai <i>norm entrepreneur</i> melalui ODA. Dimana identitas tersebut fokus pada <i>quality infrastructure</i> yang nantinya akan berdampak pada kemajuan negara <i>recipient</i> . Ide yang dibangun Jepang, walapun bertentangan dengan anggota <i>Development Assistance Committee (DAC)</i> Jepang tetap pada pendiriannya untuk lebih menekan nilai kemajuan pembangunan.
7.	Minami, 2013	<i>Normalizing" Japan? Contestation, Identity Construction, and the Evolution of Security Policy</i>	Peneliti pada tulisan ini menjelaskan bahwa terjadinya pembentukan identitas baik pada ruang lingkup domestik dan internasional disebabkan oleh adanya kontestasi diantara kelompok identitas (<i>identity group</i>) yang menentukan kepentingan negara.

8.	Young Soo Kim and Joongbum Shin, 2019	<i>Do Norms Theories Matter? Viability of Constructivist Approach for the Studies of Foreign Aid</i>	<p>Pada tulisan ini, peneliti mengkaji <i>foreign aid agency</i> pada studi kasus HIV/AIDS dengan pendekatan konstruktivist. Memaparkan peran norma internasional dalam proses terbentuknya suatu ide dari interaksi antar <i>state-actor</i> maupun <i>non-state actor</i> untuk mempengaruhi bagaimana aktor lain untuk bertindak dan bekerjasama dalam membangun suatu ide atau persepsi untuk merespon atau menyikapi isu global. Berargumentasi dari keadaan global yang darurat terkait HIV/AIDS, tidak semua negara berpartisipasi dalam penanggulangan isu tersebut. Jepang salah satu negara yang tidak membantu secara finansial. Namun, norma-norma baik itu norma domestik maupun norma internasional menuntut solidaritas negara-negara untuk merealisasikan bantuan luar negeri sebagai bentuk partisipasi penanggulangan isu kesehatan secara global.</p>
9.	Finnemore & Sikkink 1998	<i>International Norm Dynamics and Political Change</i>	<p>Untuk memahami landasan tindakan aktor, perlu memahami beberapa norma, yaitu kemunculan norma (<i>norm emergence</i>) yang diartikulasikan oleh <i>norm entrepreneur</i> untuk mendapatkan legitimasi (<i>norm cascade</i>), selanjut apabila disepakati maka akan berlanjut ke tahap internalisasi (<i>norm internalization</i>) yaitu meratifikasi kesepakatan internasional.</p>

10.	Hagström & Gustafsson, (2014)	<i>Japan and identity change: why it matters in International Relations</i>	Pada tulisan ini, <i>identity entrepreneur</i> merupakan aktor politik yang mempromosikan dan bahkan mampu mengubah identitas Jepang. Terutama <i>identity entrepreneur</i> yang dimainkan oleh aktor politik elit melalui representasi diskursif dari isu dan aktor untuk mengkontruksi identitas Jepang seperti yang mereka inginkan.
11.	MOFA, 2021	<i>Japan's Official Development Assistance Charter</i>	ODA Jepang merupakan pondasi bagi kebijakan bantuan luar negeri. Pengambilan kebijakan ODA Jepang berlandaskan pada norma internasional, dan sadar akan eksistensi norma tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap aktor-aktor memiliki <i>collective understanding</i> bahwa terdapat isu global seperti <i>global warming</i> , permasalahan lingkungan, penyakit, populasi, makanan, bencana alam, narkoba dan teroris yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mengambil tindakan.
12.	Erbas, 2022	<i>Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations</i>	Penulis dalam artikel ini menemukan bahwa identitas dan kepentingan aktor sebagai produk dari kontruksi sosial berperan penting bagi negara dalam menentukan kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional. Kegiatan, relasi dan interaksi berperan dengan signifikan bagi agen dan struktur, dimana kegiatan yang terjalin antar aktor bisa memahami satu sama lain dan mampu membangun dan membentuk identitas mereka sendiri.
13.	Sato & Hirata, 2008	<i>Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy</i>	Dalam tulisan, konstruktivis berpandangan bahwa perubahan dalam perilaku suatu negara tidak dapat dikaitkan dengan insentif material tetapi pada

			interpretasi baru negara atau kesadaran akan nilai suatu norma tertentu. Dalam proses sosialisasi, negara dapat menemukan kepentingan baru dalam kebijakan luar negeri yang dapat menyebabkan negara menerima norma dan kebijakan baru. Dengan kata lain, kepentingan negara bersifat berubah-ubah dan tidak diberikan secara eksogen.
--	--	--	--

Dari kajian pustaka yang disuguhkan diatas, menjadi acuan penulisan dalam tesis ini. Beberapa kajian yang terkait dengan bantuan ODA Jepang beserta kajian lainnya yang terkait tentang pandangan konstruktivis terhadap bantuan luar negeri Jepang. Kajian pustaka yang dituliskan diatas secara khusus memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan perspektif konstruktivis sebagai perspektif utama untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu mengapa Jepang memberikan bantuan dana lunak untuk pembangunan IPAL di Jakarta. Maka digunakanlah konsep konstruktivisme untuk menelisik bantuan Jepang yang disalurkan melalui JICA kepada Indonesia. Dalam pandangan konstruktivisme menyetujui bahwa perilaku antar negara mempengaruhi kepentingan negara untuk mengambil tindakan yang akan berimplikasi terhadap identitas negara.

Konstruktivisme memiliki sebuah cara pandang yang mengedepankan dimensi gagasan dari pada dimensi material, dimana identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan dan meyakini bahwa realitas sosial merupakan suatu konstruksi sosial. Dalam konsep konstruktivisme yang dijelaskan oleh Alexander Wendt bahwa (Wendt, 1992) *social construction of international politics is to analyse how processes of interaction produce and reproduce the social structures-cooperative or conflictual-that shape actors' identities and interests* (Wendt, 1995). Dari pernyataan Wendt, interaksi sosial bisa menimbulkan pemahaman bersama, namun bisa juga menimbulkan konflik dalam pembentukan identitas itu sendiri. Penjelasan tersebut dapat disederhanakan bahwa konstruksi sosial merupakan upaya untuk menciptakan keyakinan terhadap sesuatu kebenaran melalui proses intersubjektif dan pemahaman bersama yang pada tujuannya

adalah untuk membentuk kebenaran pada tatanan internasional. Sehingga substansi dari kepentingan terkonstruksi dari hasil perjalanan interaksi kerja sama bilateral maupun multilateral. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur sosial merupakan interaksi bilateral ataupun multilateral antar subjek atau aktor yang bisa berupa negara, *Non-Governmental Organization* (NGO) dan individu yang di mana masing-masing memiliki kemampuan dan kebutuhan dalam memenuhi persyaratan untuk berinteraksi. Sehingga dari interaksi tersebut akan menimbulkan suatu konstruksi identitas yang ingin dibangun oleh subjek atau aktor.

Penulis menggunakan konsep konstruktivis berbasis identitas. konsep identitas mendefinisikan perbedaan antara satu aktor dan aktor lainnya dengan pertanyaan “*siapakah saya?*” dan “*siapakah mereka?*”). Tanpa memahami identitas, maka aktor akan sulit untuk mendefinisikan kepentingan dan tindakannya. Demikian tipologi identitas dalam konstruktivis yang digunakan oleh penulis;

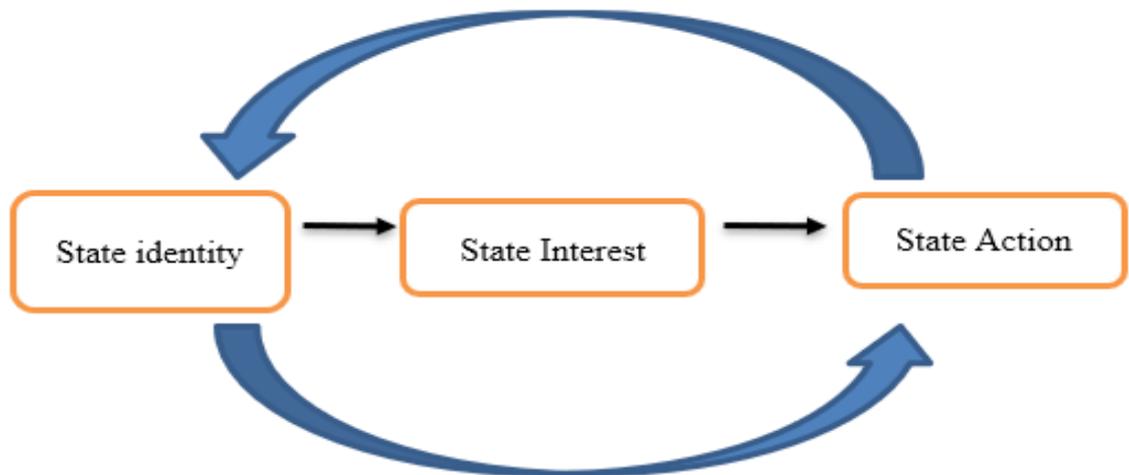
Constructivism based on identity; Konsep ini mendefinisikan identitas yang berimplikasi pada sistem internasional. Interaksi antar aktor dalam hubungan internal berkontribusi pada konstruksi identitas. Pada bagian ini, mengikuti ragam identitas menurut tipologi Wendt, membagi identitas menjadi empat kategori, yaitu; *corporate identity*, menempatkan identifikasi intrinsik untuk mendefinisikan karakteristik negara yang tidak dapat diubah dan tidak perlu pengakuan dari aktor lain. Identitas ini dibentuk oleh “pengorganisasian diri”, “struktur homeostatis” yang membedakan aktor sebagai entitas yang berbeda. Contoh dari identitas ini adalah negara kepulauan sebagai sifat bawaan. *Type identity*, yaitu atribut yang melekat pada aktor berdasarkan karakter non fisik, seperti ideologi, kepercayaan, dan sejarah. Dalam identitas peran, konstruktivis mendefinisikan identitas tidak harus selalu mengejar kepentingan negara, tetapi kontribusi dalam lingkungan internasionalnya. Karena itu, Identitas peran merupakan salah satu identitas sosial yang membutuhkan pengakuan dari aktor lain. Artinya identitas muncul karena intersubjektivitas antar negara tidak hanya dari deklarasi diri. Mengacu pada konsep *looking glass self*, *role identity* suatu negara tercipta melalui interaksinya yang melibatkan aktor – aktor lainnya. Berkaca pada bagaimana negara lain memandang negara lain, sehingga melahirkan pemikiran deskripsi identitas kepada negara lain. *Collective identity*, menurut Alexander Wendt menjelaskan bahwa identitas kolektif mengacu pada kesejahteraan negara yang menciptakan solidaritas tinggi dan rasa

memiliki kolektif dalam identitas. Sumber identitas ini bisa dari berbagai macam, seperti ideologi, persamaan sejarah, sistem politik.

Constructivism based on norm: Norma internasional menurut Raymond (2021), norma internasional adalah ekspresi pendapat yang umumnya dipegang di seluruh sistem negara tentang kelayakan perilaku kebijakan luar negeri tertentu. Selama ini hukum internasional dapat dipahami sebagai media untuk mengungkapkan pendapat, memantau perubahan dan tindakan aktor internasional. Pembentukan norma internasional tidak dapat dipisahkan dari norma domestik. Nilai-nilai norma domestik seringkali menjadi dasar dalam pembentukan norma internasional melalui perilaku dan interaksi antar aktor. Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bagaimana norma menyebar dan diadopsi oleh negara melalui 3 fase; fase pertama, Kemunculan norma ditandai dengan adanya aktor sebagai *norm entrepreneur* yang mempromosikan norma secara global. Fase kedua, isu tersebut menjadi lebih menonjol dalam wacana internasional, menarik perhatian negara-negara lain dan disebut sebagai *norm cascade*. Tahap ketiga, yaitu *norm internalization* atau internalisasi norma dimana norma mempengaruhi politik dalam negeri. Negara-negara lain menerima norma internasional berdasarkan pemahaman kognitif yang menghasilkan perpindahan norma, lokalisasi, dan penolakan penolakan.

Constructivism based on linguistic: konstruktivisme mengadopsi linguistik untuk menggambarkan suatu masalah dalam hubungan internasional. Linguistik berperan dalam mengkonstruksi realitas, mengacu pada Onuf (2012), linguistik mengambil tempat sebagai instrumen atau fasilitator dalam konstruksi sosial, bukan sebagai pembuat. Linguistik memberikan aturan untuk mengidentifikasi identitas, memberikan pilihan untuk bertindak dan memimpin tindakan aktor. Tipe ini menggambarkan isu internasional berdasarkan persepsi subjektif daripada objektif. Suatu tindakan mengandung unsur-unsur yang sangat mengubah kebahasaan menjadi performatif, yaitu tindak lokusi sebagai pernyataan, tindak ilokusi sebagai tujuan, dan tindak perlokusi sebagai respon dari pernyataannya.

Berdasarkan kerangka teori, penulis memberikan konsep untuk menganalisis topik utama dalam tesis ini. Untuk mendapatkan temuan yang tepat, penulis memilih konstruktivisme berdasarkan identitas. Menurut penulis, konsep ini menyediakan instrumen yang cukup untuk menganalisis pinjaman Jepang dan untuk menganalisis alasan di balik tindakan tersebut.



dapat dipahami dalam dua konsepsi yaitu identitas sosial dan identitas personal. *Pertama*, identitas sosial merupakan atribut yang membedakan antar aktor melalui pemahaman intersubjectivitas. Jadi identitas akan berimplikasi jika ada pihak lain (*sginificant other*). Contoh identitas social adalah status dan peran dalam masyarakat. *Kedua*, indentitas personal memiliki atribut yang relatif stabil. Karakter yang sudah melekat tanpa adanya proses interaksi. Contoh dari identitas personal adalah indentitas etnis, budaya, agama dan lain sebagainya. Wendt (1999) membagi identitas menjadi beberapa jenis, yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran dan identitas kolektif. Masing-masing identitas berkaitan dengan *needs* atau tujuan objektive dan pemahaman aktor-aktor akan mempengaruhi tindakan para aktor tersebut.

2. *State Interest*

Berdasarkan hakikat kepentingan nasional dalam perspektif konstruktivis, kepentingan itu bukan sesuatu yang sudah terbentuk atau jadi (*taken for granted*) melainkan melalui proses terjalinya interaksi antar satu aktor dan aktor lainnya. Menurut Chandler (2004) kepentingan negara dibentuk kembali melalui struktur normatif internasional yang diciptakan oleh berbagai interaksi aktor negara dan non-negara dalam masyarakat sipil global yang sebenarnya ada. Oleh karena itu kepentingan suatu negara bisa bervariasi terhadap aktor-aktor yang berinteraksi karena setiap aktor memiliki pemahaman yang berbeda terhadap aksi dan interaksi pada masing-masing aktor

3. *Action*

Tindakan yang akan dilakukan oleh aktor tergantung pada kepentingan yang ingin dicapai. Namun pada teori dasar yang dikembangkan oleh Wendt, melahirkan persamaan seperti $Desire + Belief = Action$. Dalam persamaan tersebut menjelaskan bahwa identitas (*identity*) memiliki keyakinan (*belief*) dan kepentingan (*interest*) untuk menentukan tindakan (*action*). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *identity* dan *interest* mempengaruhi *action*.

4. *Significant other*

Berangkat dari konsep *social act* yang digagas oleh Mead & Morris (2013) bahwa tindakan sosial merupakan istilah lain dari interaksi sosial. Mereka menjelaskan bahwa tindakan hanya melibatkan satu orang, jika tindakan sosial melibatkan lebih dua orang atau lebih. Dengan demikian, tindakan seseorang secara tidak langsung berlandaskan oleh sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain tersebut secara umum dikenal sebagai *significant other*, merupakan pihak yang memiliki peran pada diri seseorang. Begitu juga dalam teori *looking-glass self* bahwa persepsi orang lain mempengaruhi tindakan seseorang (Cooley, 2017). Jadi, tindakan individu atau aktor merupakan hasil dari penafsiran dan persepsi orang lain terhadap dirinya. Konsep ini dalam konstruktivis digunakan untuk menganalisis tindakan negara melalui persepsi negara lain.

5. *International Norm*

Peneliti pada bagian ini mendefinisikan norma internasional menurut pakar konstruktivis. Norma internasional secara umum dipahami sebagai produk kesepakatan dan perjanjian antarnegara dalam forum multilateral baik itu dalam komunitas dan konvensi internasional berupa seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang menjadi landasan kerja sama antarnegara (Rosyidin, 2020). Menurut Finnemore (1998) norma dibagi menjadi dua fungsi yaitu, berfungsi sebagai regulative bertujuan sebagai pemandu kebijakan negara dan berfungsi sebagai konstitutif yang bertujuan untuk memberitahu apa tujuan negara. Norma internasional juga berfungsi sebagai standar perilaku negara untuk bertindak baik dan pantas (*logic of appropriateness*).

Raymond (2021), norma internasional adalah ekspresi dari opini-opini yang umumnya dianut di seluruh sistem negara tentang kepatutan jenis perilaku kebijakan luar negeri tertentu. Sejauh ini hukum internasional dapat dipahami sebagai media untuk menyampaikan pendapat, memantau perubahan dan tindakan aktor-aktor internasional. Pembentukan norma internasional tidak lepas dari norma domestik.

Nilai-nilai dari norma domestik sering menjadi landasan dalam pembentukan norma internasional melalui prilaku dan interaksi antar aktor.

1.7 Hipotesis

Penulis memiliki argumen utama dalam melihat landasan ODA Jepang dalam memberikan bantuan terkait isu lingkungan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu Bantuan ODA Jepang ke Pemerintah Indonesia di landasi oleh faktor;

1. Identitas peran (*role identity*), di mana Jepang sebagai *environmentalist country* dikawasan Asia yang memiliki peran untuk berkontribusi mengatasi isu lingkungan baik di kawasan global maupun regional.
2. Identitas kolektif (*collective identity*) di mana Indonesia dan Jepang memiliki keadaan yang sama sebagai negara rawan bencana. Kesamaan ini menimbulkan rasa solidaritas untuk membantu mengatasi isu bencana alam seperti banjir yang terjadi di Jakarta.

1.8 Metode Penelitian

Untuk mengungkap fenomena yang terjadi, kajian ini akan dianalisis melalui metode penelitian oleh peneliti sebagai pengkontruksi realitas berdasarkan pengetahuan pada kajian penelitian. Melalui langkah-langkah yang tersusun secara ilmiah dalam usaha untuk mencari dan mengkaji fenomena secara keseluruhan untuk menemukan realitas menurut William pada buku metode penelitian yang ditulis oleh Ahyar (2020). Metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai pelaku utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data melalui sumber data sekunder ataupun primer yang berasal dari kajian terkait yaitu bantuan dana lunak Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini sangat tepat jika menggunakan metode kualitatif. Data yang didapat akan diolah dengan menggunakan pendekatan konstruktivis sehingga ekstraksi dari hasil tersebut bisa menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan kerja sama Jepang dan Indonesia dalam penelitian ini. Untuk menjaga kredibilitas data, maka data-data yang dikumpulkan dipilih secara selektif agar data tersebut dapat dipercaya.

1. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, kemudian:
 - a. Objek penelitian ini adalah Jepang sebagai aktor penyaluran bantuan dalam bentuk pinjaman dana lunak kepada Indonesia.
 - b. Sumber data yang digunakan terdiri dari data premier dari *press release*, *white paper* dan website resmi dari pemerintah Jepang. Sedangkan dari

data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel, tesis, serta data-data kredibel yang diperoleh laman resmi yang terkait

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi Pustaka (*library research*). Diperlukan langkah yang akurat dalam menentukan data yang akan diambil dalam penelitian ini. Sehingga dengan demikian, penulis mampu menghimpun data yang dipilih secara relevan, selektif dan dapat memenuhi standar data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan terkait penyaluran bantuan pinjaman dana lunak Jepang.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan melihat fenomena dan fakta yang ada dan sudah terjadi sehingga bisa diuraikan dan dianalisis agar memberikan hasil konstruksi yang natural. Data dari fakta dan fenomena tersebut dikolerasikan antara satu dengan yang lain. Sehingga penulis dapat menarik akhir kesimpulan sebagai acuan penulis dan pembaca, serta menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk deskripsi. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan kajian penelitian melalui pemaparan sesuai dengan data yang sudah dianalisis, sehingga temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini akan mudah dipahami. Dengan demikian, hasil yang ditemukan akan sesuai dengan pertanyaan dan menjaga fokus pembahasan dalam kajian penelitian.

1.9 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian untuk menemukan identitas sosial pada landasan pinjaman dana lunak dari Jepang untuk pembangunan IPAL di Jakarta dan apa tujuan dalam bantuan tersebut. Selain itu penulis juga membatasi tahun pinjaman dana tersebut dimulai dari tahun 2019-2021. Batasan fokus penelitian dimaksudkan agar sesuai dengan rumusan masalah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu;

BAB I: Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan *entry point* bantuan ODA Jepang ke Pemerintah Indonesia

BAB III: Memaparkan tentang perkembangan ODA Jepang dan bentuk bantuan ODA Jepang di Indonesia khususnya di Jakarta

BAB IV: Analisis bantuan Jepang berbasis *role identity* dan *collective identity*

BAB V: Sebagai bab akhir dalam penelitian ini, terdapat kesimpulan dari hasil pembahasan bab yang sudah dipaparkan.